

## **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA TOBELOS KECAMATAN IBU SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

*Santrius Siwal<sup>1</sup>*  
*Marthen Kimbal<sup>2</sup>*  
*Novie Pioh<sup>3</sup>*

### **Abstrak**

Efektifitas pelaksanaan tugas pemerintah dalam pembangunan desa adalah di perlukan adanya target capaian yang jelas dan terukur. Sederhananya dalam lingkungan pemerintah desa kepala desa dan seluruh perangkat desa sebagai pelaksana tugas pemerintah di desa diharapkan dapat melaksanakan tugas pemerintah desa dengan efektif demi terciptanya kesejahteraan dan pembangunan rakyat pedesaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan tugas pemerintahan desa dalam pembangunan di Desa Tobelos Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa efektifitas pelaksanaan pembangunan pemerintahan Desa Tobelos dilihat dari indikator “produksi” masih kurang baik. Realisasi program/kegiatan pemerintah desa yang ditetapkan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat umumnya belum optimal, dan efektifitas pelaksanaan pembangunan pemerintahan Desa Tobelos dilihat dari indikator “efisiensi” masih kurang baik. Penggunaan sumberdaya organisasi Sumber Daya Manusia perangkat desa, dana/keuangan, dan sarana kerja belum dapat mengoptimalkan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan desa.

**Kata Kunci : Efektivitas, Tugas, Pemerintah Desa, Pembangunan.**

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

<sup>2</sup> Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

<sup>3</sup> Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

## Pendahuluan

Salah satu sasaran utama dari efektifitas pelaksanaan tugas pemerintah desa yakni terciptanya pelayanan yang baik kepada masyarakat, adanya pembangunan yang dihasilkan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsi pemerintah desa. Dalam pelaksanaan tugas pemerintah desa diharapkan dapat membangun kerja sama yang baik secara internal, agar dalam menjalankan tugas sebagai abdi masyarakat dengan baik dan sesuai peraturan perundang-undangan. Efektifitas pelaksanaan tugas pemerintah dalam pembangunan desa adalah di perlukan adanya target capaian yang jelas dan terukur. Sederhananya dalam lingkungan pemerintah desa kepala desa dan seluruh perangkat desa sebagai pelaksana tugas pemerintah di desa diharapkan dapat melaksanakan tugas pemerintah desa dengan efektif demi terciptanya kesejahteraan dan pembangunan rakyat pedesaan.

Pemerintah Desa Tobelos merupakan suatu lembaga dan organisasi pemerintah yang ada di wilayah Kabupaten Halmahera Barat, yang berupaya untuk melaksanakan tugas Pemerintah desa secara efektif demi tercapainya pembangunan yang sudah disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau yang disebut dengan RPJM-Des dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dengan materi muatan menyangkut bidang-bidang program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa; Tujuan dari pada itu, agar masyarakat dapat merasakan esensi dari otonomi daerah yang berimbas kepada otonomi desa. Maka, demi terlaksananya pelaksanaan tugas pemerintah desa secara efektif diperlukan kerja sama yang baik dari perangkat pemerintah desa mulai dari

Kepala Desa sampai pada Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur pemerintah desa yang memiliki kualitas dalam membangun desa yang mandiri.

Namun sesuai realitas yang terjadi di Desa Tobelos bahwa efektifitas pelaksanaan tugas pemerintah Desa dalam pembangunan di Desa Tobelos belum efektif. Karena berdasarkan dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPdes) atau yang disebut dengan program tahunan hampir semua program pembangunan tidak tercapai hasil yang secara efektif sebab sejauh ini program pembangunan yang baru terealisasi ialah timbunan tanah jalan tani dan pengadaan kursi gereja. Sedangkan hal lain seperti pagar, irigasi, kantor desa, Gedung serbaguna dan pembangunan jalan rabat beton belum di realisasi sampai saat ini, sebaliknya juga pembangunan secara non fisik seperti pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat pun tidak dirasakan oleh masyarakat Hal ini disebabkan karena kurang efektifnya pemerintah desa serta dianggap kurang disiplin dalam hal waktu melaksanakan tugas, menjalankan program pembangunan yang tidak partisipatif, dan tidak mengetahui tugas dan fungsi yang secara jelas, sehingga terjadi kurang efektif jalannya roda pemerintah di Desa Tobelos. Rendanya tingkat efektifitas pelaksanaan tugas pemerintah desa Tobelos Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat sehingga menunjukkan kurangnya pembangunan yang ada di Desa.

## Tinjauan Pustaka

Kata efektif berasal dari bahasa inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan

berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Robbins (2004:10), memberikan definisi efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Menurut Martani dan Lubis (1987:55), ada tiga pendekatan dalam mengukur efektivitas organisasi, yaitu:

1. Pendekatan sumber (resource approach) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Pendekatan proses (process approach) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
3. Pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.

Steers (1985:87) mengemukakan bahwa: Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarnya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya.

Adapun Martoyo (1998:4) memberikan definisi sebagai berikut: Efektivitas dapat pula diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan

dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan.

Menurut Gibson dkk (2002:151) bahwa pendekatan tujuan untuk mengevaluasi atau mengukur efektivitas organisasi tersebut didasarkan pada gagasan bahwa organisasi diciptakan sebagai alat untuk mencapai tujuan; dengan kata lain, organisasi dibentuk dengan maksud untuk mencapai tujuan. Pendekatan teori sistem dalam menilai atau mengukur efektivitas organisasi menekankan pada pentingnya adaptasi organisasi terhadap tuntutan sistem sebagai kriteria efektivitas. Dalam pandangan teori sistem ini, organisasi dilihat sebagai satu unsur dari sejumlah unsur yang saling berhubungan dan saling bergantung satu sama lain.

Organisasi mengambil input dari sistem yang lebih luas (yakni lingkungan), kemudian memproses input-input itu, dan selanjutnya mengembalikannya dalam bentuk yang sudah diubah (output). Menurut Gibson dkk (2002:8), ada dua kesimpulan pokok dari teori sistem tentang kriteria efektivitas, yaitu : (1) kriteria efektivitas harus menggambarkan seluruh siklus input – proses – output, tidak hanya output saja; dan (2) kriteria efektivitas harus menggambarkan hubungan timbal-balik antara organisasi dengan lingkungan yang lebih luas yaitu tempat hidupnya organisasi. Dengan demikian menurut Gibson dkk (2002:9) bahwa kriteria untuk menilai/mengukur efektivitas organisasi menurut dimensi waktu, yaitu : (1) Ukuran jangka pendek, meliputi : produksi (production), efisiensi (efficiency), kepuasan (satisfaction); (2) Ukuran jangka menengah, terdiri atas: adaptasi (adaptiveness), dan perkembangan (development); (3) Ukuran jangka panjang, yaitu kelangsungan hidup

organisasi. Kriteria untuk menilai atau mengukur efektivitas organisasi tersebut dijelaskan oleh Gibson dkk (2002) sebagai berikut :

1. Produksi (production), ialah menggambarkan tingkat kemampuan organisasi untuk menghasilkan jumlah dan mutu output yang dibutuhkan lingkungan. Ukuran produksi dapat berupa seperti : jumlah kerja yang berhasil diselesaikan, jumlah orang yang berhasil dilayani, dokumen yang berhasil diproses, dan sebagainya).
2. Efisiensi (efficiency), ialah perbandingan terbaik antara output dan input. Ukuran efisiensi harus dinyatakan dalam perbandingan, misalnya: perbandingan antara hasil kerja dengan biaya atau dengan waktu yang dipergunakan untuk menghasilkan hasil itu.
3. Kepuasan (satisfaction), tingkat seberapa jauh organisasi memenuhi kebutuhan pegawainya. Ukuran kepuasan meliputi seperti sikap pegawai, kemangkiran (absensi), keterlambatan, dan keluhan.

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dipahami bahwa efektivitas dalam proses suatu program yang tidak dapat mengabaikan target sasaran yang telah ditetapkan agar operasionalisasi untuk mencapai keberhasilan dari program yang dilaksanakan dapat tercapai dengan tetap memperhatikan segi kualitas yang diinginkan oleh program.

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan

pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang. Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan

dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;

2. Resouces (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.
3. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program.
4. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu:

1. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan.
2. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan.
3. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan

pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dari pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa pelaksana suatu program senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut. Pelaksanaan (Actuating), adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Jadi actuating artinya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan dikehendaki secara efektif. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kepemimpinan. Actuating adalah pelaksanaan untuk bekerja.

Pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional dan pembangunan desa ini memiliki arti dan peranan yang penting dalam mencapai tujuan nasional, karena desa beserta masyarakatnya merupakan basis dan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Menurut Kartasmita (2001:66) mengatakan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan. Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Suparno (2001:46) menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya

antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri. Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat yang dipadukan dengan masyarakat. Perpaduan tersebut menentukan keberhasilan pembangunan seperti yang dikemukakan oleh Ahmadi (2001:222) mekanisme pembangunan desa adalah merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di satu pihak. Bahwa pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat sendiri. Sedangkan pemerintah memberikan bimbingan, bantuan, pembinaan, dan pengawasan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pembangunan desa dapat dilihat dari berbagai segi yaitu sebagai suatu proses, dengan suatu metode sebagai suatu program dan suatu gerakan, sebagaimana pendapat pakar berikut:

1. Sebagai suatu proses adalah memperhatikan jalannya proses perubahan yang berlangsung dari cara hidup yang lebih maju/modern. Sebagai suatu proses, maka pembangunan desa lebih menekankan pada aspek perubahan, baik yang menyangkut segi sosial, maupun dari segi psikologis. Hal ini akan terlihat pada perkembangan masyarakat dari suatu tingkat kehidupan tertentu ketingkat kehidupan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan di dalamnya masalah perubahan sikap, serta perubahan lainnya yang apabila diprogramkan secara sistematis akan usaha penelitiandan pendidikan yang sangat baik.
2. Sebagai suatu metode, yaitu suatu metode yang mengusahakan agar rakyat mempunyai kemampuan yang mereka miliki. Pembangunan desa juga merupakan metode untuk mencapai pemerataan pembangunan desa dan hasil-hasilnya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Sebagai suatu program adalah berusaha meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pedesaan baik lahir maupun bathin dengan perhatian ditujuka pada kegiaitan pada bidang-bidang tertentu seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, industri rumah tangga, koperasi, perbaikan kampung halaman dan lain-lain.
4. Sebagai suatu gerakan karena pada hakekatnya semua gerakan atau usaha kegiatan pembangunan diarahkan ke desa-desa. Sebagai suatu gerakan dimana pembangunan desa mengusahakan mewujudkan masyarakat sesuai dengan cita-cita Nasional Bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
5. Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa pembangunan desa meliputi beberapa faktor dan berbagai program yang dilaksanakan oleh aparat departemen, pemerintah daerah dan seluruh masyarakat. Oleh karena itu pelaksanaannya perlu ada koordinasi dari pemerintah baik pusat maupun daerah serta desa sebagai tempat pelaksanaan pembangunan agar seluruh program kegiatan tersebut saling menunjang dan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Permasalahan di dalam pembangunan perdesaan adalah rendahnya aset yang dikuasai masyarakat perdesaan ditambah lagi dengan masih rendahnya akses masyarakat perdesaan ke sumber daya ekonomi seperti lahan/tanah, permodalan, input produksi, keterampilan dan teknologi, informasi, serta jaringan kerjasama.

Upaya-upaya untuk tercapainya kenaikan kesejahteraan hidup bagi setiap individu maupun masyarakat luas, dalam pengertian sehari-hari seringkali disebut sebagai upaya “pembangunan” (Aprilia Theressia dkk, 2015:1). Menurut Riyadi dalam (Aprilia Theresia dkk, 2015:2), mendefinisikan bahwa pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat (dan atau individu-individu di dalamnya ) yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu. Yang dimaksud dengan kesejahteraan disini, bukanlah sekedar terpenuhinya kebutuhan pokok yang terdiri dari pangan, sandang, dan perumahan atau pemukiman. Oleh sebab itu, dalam (Aprilia Theresia dkk, 2015:3) menjelaskan bahwa dalam istilah pembangunan, terkandung begitu pokok-pokok pikiran, yang antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan yang tidak pernah kenal berhenti, untuk terus menerus mewujudkan perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat dalam rangka mencapai perbaikan mutu hidup, dalam situasi lingkungan kehidupan yang juga terus menerus mengalami perubahan.
2. Proses pembangunan yang terjadi bukanlah sesuatu yang sifatnya alami atau “griven”, melainkan suatu proses yang dilaksanakan dengan

sadar dan terencana. Artinya pembangunan tersebut dilaksanakan melalui suatu proses perencanaan terlebih dahulu, untuk menganalisis masalah-masalah atau kebutuhan-kebutuhan yang akan harus dipenuhi, tujuan-tujuan yang ditetapkan atau yang hendak dicapai, alternatif pencapaian tujuan dan pengambilan keputusan tentang cara-cara mencapai tujuan yang terpilih, dengan senantiasa mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan resiko yang harus dihadapi.

3. Proses perubahan yang dilaksanakan dan ingin dicapai dalam setiap pembangunan, adalah perubahan yang menyeluruh yang mencakup beragam aspek dan tatanan kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Pembangunan pada hakikatnya adalah suatu “eco development” yang tidak hanya berupa perubahan-perubahan ekonomi. Pembangunan juga mencakup “dehumanisasi” kultural dan perubahan-perubahan mentalitas masyarakat dalam suatu struktur sosial-politik tertentu.
4. Pembangunan, dimaksudkan untuk menghasilkan individu-individu yang senantiasa memiliki kepekaan tentang : keadaan-keadaan yang terjadi, masalah-masalah yang sedang dan akan terjadi, alternatif-alternatif yang mungkin dilaksanakan untuk mengatasi atau memecahkan masalah tersebut, dan dengan kemampuan sendiri dalam mengambil keputusan untuk memilih alternatif-alternatif “terbaik yang dapat dilaksanakan” demi perbaikan mutu hidup masyarakat dan keluarganya.
5. Pembangunan adalah sesuatu yang dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Sehingga, pembangunan bukanlah kegiatan yang direncanakan dan dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan segolongan atau sekelompok warga masyarakat.

Dalam Afifuddin (2012:52), Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam jangka panjang, sedang, dan jangka pendek. Perencanaan pembangunan merupakan tugas pokok dalam administrasi dan manajemen pembangunan. Selanjutnya hakikat pembangunan adalah membangun masyarakat atau bangsa secara menyeluruh, demi tercapainya kesejahteraan rakyat.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong, (2006:92) metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Williams dalam Moleong, (2006:83) menulis bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus Moleong, (2006).

Konsep yang menjadi fokus penelitian ini adalah efektivitas pelaksanaan tugas pemerintah desa dalam pemabangunan, yaitu didefinisikan sebagai keberhasilan pelaksanaantugas pemerintah desa dalam mencapai tujuan dan sasaran pemerintahan desa dalam pembangunan yang telah ditetapkan.

Efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan desa diamati dari tiga kriteria efektivitas yaitu : produksi atau hasil, efisiensi, dan adaptasi/fleksibilitas. Fokus penelitian tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Produksi, yaitu pencapaian atau realisasi program-program dan kegiatan-kegiatan pemerintah desa yang direncanakan pada setiap tahun anggaran
2. Efisiensi, yaitu ketepatan penggunaan sumber daya organisasi terutama SDM dan biaya dalam pencapaian realisasi program dan kegiatan pemerintah desa yang sudah direncanakan/ditetapkan.
3. Adaptasi atau fleksibilitas, yaitu kemampuan pemerintah desa dalam menanggapi perkembangan tugas/pekerjaan atau dalam menghadapi/menangani persoalan yang muncul.

Sumber data atau informan pada penelitian ini diambil dari unsur pemerintah desa, unsur BPD, unsur LPM dan unsur warga masyarakat. Jumlah informan yang diwawancarai sebanyak 7 orang, yaitu :

1. Kepala Desa: 1 orang
2. Kaur Pemerintahan: 1 orang
3. Kasie Pembangunan : 1 orang
4. Kepala Dusun/Ketua RT : 1 orang
5. Ketua BPD : 1 orang
6. Ketua LPM: 1 orang
7. Warga Desa: 1 orang

## Hasil Penelitian

Berdasarkan teori sistem tersebut maka dalam penelitian ini efektivitas tugas pelaksanaan pemerintah desa dalam pembanguunan di Desa Tobelos dilihat dari tiga kriteria/dimensi indikator yaitu : produksi, efisiensi, dan adaptasi/fleksibiitas. Hasil penelitian

sebagaimana telah dideskripsikan dan dirangkum di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Produksi, indikator produksi melihat pencapaian atau realisasi program-program dan kegiatan-kegiatan pemerintah desa yang direncanakan pada setiap tahun anggaran. Artinya, efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dilihat dari keberhasilan pemerintah desa dalam melaksanakan dan merealisasikan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan dibidang pemberdayaan masyarakat desa. Hasil penelitian menunjukkan :
2. Rencana program/kegiatan pemerintah desa di bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat dituangkan dalam RKP-Desa pada setiap tahun anggaran yang ditetapkan dalam musyawarah desa.
3. Pelaksanaan dan realisasi atau capaian hasil program di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa belum optimal.
4. Pelaksanaan dan realisasi atau capaian hasil program dibidang pembangunan desa belum optimal. Program pembangunan yang sudah direncanakan seringkali tidak dapat dilaksanakan. Demikian pula, program pembangunan yang dilaksanakan sering tidak dapat diselesaikan dengan maksimal.
5. Program di bidang pembinaan kemasyarakatan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan, dan hasil-hasil yang dicapai masih kurang.

6. Program di bidang pemberdayaan masyarakat desa belum banyak yang dapat dilaksanakan, dan hasil yang dicapai masih jauh dari harapan masyarakat setempat.

Hasil penelitian tersebut dapat menunjukkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa di Desa Tobelos dilihat dari kriteria/indikator produksi nampaknya belum optimal atau dapat dikatakan masih kurang optimal. Kondisi tersebut terjadi disebabkan oleh berbagai faktor. Berdasarkan pengakuan dari kepala desa dan informan lain yang diwawancarai bahwa belum optimalnya prduktivitas pemerintah desa disebabkan terutama oleh kualitas SDM aparat desa masih rendah, dana/keuangan pemerintah desa masih minim, dan sarana kerja masih sangat tidak memadai. Oleh karena itu, ke depan harus dilakukan perbaikan atau peningkatan kualitas SDM aparat desa, dana/keuangan desa, dan sarana kerja bagi pemerintah desa.

Konsep efisiensi mengandung pengertian sebagai rasio atau perbandingan antara output dengan input, atau antara hasil dengan sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Dalam penelitian ini indikator efisiensi menunjuk kepada ketepatan penggunaan sumber daya organisasi yang dimiliki oleh pemerintah desa terutama SDM, biaya, sarana kerja untuk pencapaian realisasi program dan kegiatan pemerintah desa yang sudah direncanakan atau ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan:

1. Penggunaan SDM perangkat desa untuk pelaksanaan program/kegiatan pemerintah desa belum optimal. Aparat perangkat desa belum sepenuhnya terkonsentrasi melaksanakan tugas karena masih melaksanakan pekerjaan lain.

2. Penggunaan dana/keuangan pemerintah desa masih belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dalam APB-Desa. Kepala Desa masih sering mengalihkan penggunaan dana/anggaran untuk kegiatan lain yang tidak ada dalam APB Desa.

3. Penggunaan sarana kerja belum efisien karena sarana kerja yang ada sangat terbatas dan tidak memadai. Keseluruhan hasil penelitian tersebut dapat menunjukkan efektivitas tugas pelaksanaan pemerintah desa dalam pembangunan dilihat dari indikator efisiensi nampaknya juga masih belum optimal.

Aspek yang perlu digaris bawahi dari hasil penelitian tersebut adalah penggunaan SDM aparat desa belum maksimal. Berdasarkan pengakuan dari kepala desa dan juga para aparat perangkat desa bahwa keadaan tersebut terjadi karena para aparat perangkat desa belum terkonsentrasi penuh pada tugas karena masih harus membagi waktu untuk melaksanakan pekerjaan/usaha yang menjadi sumber utama pendapatan mereka. Hal demikian mereka lakukan karena belum ada gaji tetap sebagai aparat desa, sedangkan tunjangan yang diterima dirasakan sangat kecil/rendah. Implikasi dari hasil temuan penelitian tersebut adalah ke depan para aparat perangkat desa harus diberi penghasilan tetap (gaji) dan tunjangan yang memadai. Pembayaran gaji dan tunjangan para perangkat desa juga harus rutin tiap bulan.

Adaptasi/fleksibilitas Sebagai kriteria/indikator efektivitas organisasi adaptasi/fleksibilitas tingkat sejauh mana organisasi dapat menanggapi perubahan internal dan eksternal. Kriteria ini berkenaan dengan kemampuan manajemen untuk menduga

adanya perubahan dalam lingkungan eksternal maupun dalam lingkungan internal organisasi itu sendiri (Gibson dkk, 2002). Dalam penelitian ini adaptasi/fleksibilitas dilihat dari kemampuan pemerintah desa dalam menanggapi perkembangan tugas/pekerjaan atau dalam menghadapi dan menangani persoalan yang muncul di masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan :

1. Kemampuan adaptasi pemerintah desa dalam menghadapi peningkatan tugas masih rendah.
2. Penugasan tertentu dari pemerintah pusat/provinsi/kabupaten dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa namun hasilnya seringkali tidak maksimal.
3. Pemerintah desa juga masih kurang tanggap terhadap perkembangan atau permasalahan yang muncul di masyarakat. Penanganan atau penyelesaian terhadap persoalan dan permasalahan yang muncul di masyarakat masih lambat.

Temuan penelitian tersebut dapat menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan pemerintahan Desa dalam pembangunan Tobelos dilihat dari indikator adaptasi/fleksibilitas masih kurang baik atau rendah. Rendahnya kemampuan adaptasi/fleksibilitas tersebut disebabkan terutama oleh masih rendahnya kemampuan SDM aparat pemerintah desa; karena itu ke depan perlu peningkatan kualitas SDM aparat desa untuk meningkatkan kemampuan adaptasi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.

## Kesimpulan

1. Efektivitas pelaksanaan pembangunan pemerintahan Desa Tobelos dilihat dari indikator “produksi” masih kurang baik. Realisasi program/kegiatan

pemerintah desa yang ditetapkan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat umumnya belum optimal.

2. Efektivitas pelaksanaan pembangunan pemerintahan Desa Tobelos dilihat dari indikator "efisiensi" masih kurang baik. Penggunaan sumberdaya organisasi (SDM perangkat desa, dana/keuangan, dan sarana kerja) belum dapat mengoptimalkan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan desa.
3. Efektivitas pelaksanaan pembangunan pemerintahan desa dalam pembangunan di Desa Tobelos dilihat dari indikator kemampuan adaptasi/fleksibilitas pemerintah desa juga masih kurang baik. Perubahan atau peningkatan tugas serta permasalahan yang muncul di masyarakat belum secara optimal dapat ditangani dan diselesaikan dengan cepat dan tepat oleh pemerintah desa.

## Saran

1. Kualitas SDM kepala desa dan perangkat desa perlu ditingkatkan melalui pelatihan atau penataran.
2. Sumber penerimaan keuangan pemerintah desa seperti ADD dan sumber penerimaan lainnya yang diamanatkan dalam UU.No.6 Tahun 2004 hendaklah dioptimalkan.
3. Kepala Desa dan Perangkat Desa Tobelos hendaklah diberikan penghasilan tetap dan tunjangan yang memadai.
4. Sarana kerja pada kantor kepala desa perlu disediakan dengan memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas perangkat desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, S. 2012. Pengantar Administrasi Pembangunan. Bandung: Alfabeta.
- Ahmadi, A. 2001. Konsep Pembangunan Desa. Jakarta : Rineka Cipta.
- Buku Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa file:///F:/%C2%A0/BAB%20II%20LANDASAN%20TEORI.pdf
- Gibson ,L. J. 2002.Organization, terjemahan. Jakarta: Erlangga.
- Kaelan, 2014. Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner. Yogyakarta: Pustaka Setia.
- Kamus Ilmiah Populer
- Kartasasmita, G. 2001. Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Dan Pemerataan. Jakarta: Pustaka CIDESINDO.
- Koentjaraningrat, 2015. Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Cet-21.
- Mardikanto, 2014. Corporate Social Responsibility. Bandung : Alfabeta
- Pasolong, H. 2013. Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung :Alfabeta.
- PERMEN No. 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Robbins, S. P. 2004.Teori Organisasi, Struktur, Desain, Dan Aplikasi. New Jersey : Prentice Hall.
- Sugiyono, 2014. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Bandung : Alfabeta
- Sujarweni, W. 2015. Akuntansi Desa. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Suparno, A. S. 2001. Pembangunan Kompetensi Belajar. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional.

# EKSEKUTIF

ISSN : 2337 - 5736

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Volume 2 No. 2 Tahun 2018  
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

Theresia, A. 2015. Pembangunan  
Berbasis Masyarakat. Bandung:  
Alfabeta  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  
Tentang Desa

Widjaj, A. W. 2003. Otonomi Desa  
Merupakan Otonomi Yang Asli  
Bulat dan Utuh. Jakarta: PT Raja  
Grafindo Persada.